



KEKUATAN VISUM PSIKIATRIKUM DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

THE POWER OF PSYCHIATRIC VISUM IN PROVING CRIMINAL CASES OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN

Tika Julaika¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Email: tikajulaika36@gmail.com¹, hoedyjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 27-07-2025

Revised : 28-07-2025

Accepted : 30-07-2025

Published : 03-08-2025

Abstract

Sexual violence against children is a serious crime that can cause profound psychological effects on the victims. In criminal trials, psychiatric medical reports (visum psikiatrikum) are often used as evidence to demonstrate the psychological impact experienced by the victims. This study aims to analyze the strength of visum psikiatrikum in proving cases of child sexual violence and the factors influencing its validity and effectiveness as evidence. The findings indicate that although visum psikiatrikum plays an important role, it cannot stand alone without support from other evidence. Factors such as the quality of the examination, the understanding of judges, and social-cultural conditions influence the effectiveness of visum psikiatrikum in proving the case. Therefore, it is recommended that psychiatric examinations be standardized and that judges receive further training in understanding the importance of visum psikiatrikum as evidence.

Keywords: *Visum Psikiatrikum, Criminal Case Proof, Sexual Violence*

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang sangat serius dan dapat menimbulkan dampak psikologis yang mendalam pada korban. Dalam proses peradilan pidana, visum psikiatrikum sering digunakan sebagai alat bukti untuk menggambarkan dampak psikologis yang dialami oleh korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan visum psikiatrikum dalam pembuktian perkara pidana kekerasan seksual terhadap anak serta faktor-faktor yang mempengaruhi validitas dan efektivitasnya sebagai alat bukti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun visum psikiatrikum memiliki peran penting, visum ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan bukti lain. Faktor-faktor seperti kualitas pemeriksaan, pemahaman hakim, dan kondisi sosial budaya turut mempengaruhi efektivitas visum psikiatrikum dalam pembuktian. Oleh karena itu, disarankan agar prosedur pemeriksaan psikiatrikum lebih distandarisasi dan peningkatan pelatihan bagi hakim dalam memahami pentingnya visum psikiatrikum sebagai alat bukti.

Kata Kunci: *Visum Psikiatrikum, Pembuktian Perkara Pidana, Kekerasan Seksual*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat serius dan memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan korban. Kejahatan ini tidak hanya merusak fisik anak, tetapi juga mengganggu kesehatan mental dan emosional mereka. Sebagai suatu perbuatan yang melibatkan kekuasaan dan dominasi terhadap pihak yang lebih lemah, kekerasan seksual terhadap anak dapat mengakibatkan trauma psikologis yang mendalam dan berlangsung seumur hidup. Kejahatan ini telah menjadi permasalahan serius yang dihadapi banyak negara di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia (Wahyuni, 2018). Dalam konteks ini, upaya hukum untuk



mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi sangat penting. Meskipun telah ada upaya yang cukup intensif dari pemerintah dan berbagai lembaga untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual, namun jumlah kasus yang dilaporkan masih sangat tinggi, yang menunjukkan bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam sistem penegakan hukum.

Di Indonesia, hukum pidana memiliki aturan yang jelas untuk memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun, meskipun ada landasan hukum yang kuat, tantangan terbesar yang sering dihadapi adalah dalam proses pembuktian di pengadilan. Pembuktian menjadi elemen yang sangat vital dalam setiap perkara pidana, termasuk dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Salah satu alat bukti yang sering digunakan dalam perkara pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah visum psikiatrikum, yaitu hasil pemeriksaan psikologis terhadap korban yang dilakukan oleh tenaga medis atau ahli yang memiliki kompetensi di bidang psikiatri. Visum psikiatrikum dapat memberikan gambaran mendalam mengenai kondisi mental dan emosional korban yang mungkin mengalami gangguan psikologis akibat trauma yang dialami. Oleh karena itu, visum psikiatrikum menjadi salah satu bukti yang sangat penting dalam membuktikan bahwa kekerasan seksual memang benar terjadi dan dampaknya terhadap korban sangat signifikan.

Namun, meskipun visum psikiatrikum sering digunakan dalam proses peradilan, kekuatan visum ini sebagai alat bukti dalam perkara pidana tidak selalu diterima sepenuhnya oleh pihak pengadilan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya adalah pertanyaan mengenai keakuratan dan objektivitas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga medis (Siregar et al, 2020). Validitas visum psikiatrikum sangat bergantung pada berbagai faktor, seperti metode pemeriksaan yang digunakan, kemampuan dan kredibilitas tenaga medis yang melakukan pemeriksaan, serta kondisi korban saat diperiksa. Dalam beberapa kasus, visum psikiatrikum juga bisa dipertanyakan apabila korban tidak dapat memberikan keterangan yang cukup jelas atau terperinci mengenai kejadian yang dialaminya, terutama jika korban masih berada dalam kondisi trauma. Oleh karena itu, sering kali visum psikiatrikum dianggap tidak cukup kuat sebagai bukti tunggal dalam perkara pidana, dan memerlukan dukungan dari bukti lainnya.

Visum psikiatrikum bukanlah satu-satunya alat bukti yang digunakan dalam pembuktian perkara pidana kekerasan seksual terhadap anak, namun pentingnya bukti ini dalam menggambarkan dampak psikologis yang dialami oleh korban tidak dapat diabaikan. Dalam banyak kasus, visum psikiatrikum dapat menjadi bukti yang sangat kuat apabila dikombinasikan dengan alat bukti lainnya, seperti kesaksian korban, bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian, serta bukti lainnya yang dapat mendukung klaim adanya kekerasan seksual. Oleh karena itu, meskipun visum psikiatrikum sering kali hanya menjadi salah satu bagian dari pembuktian, keberadaannya tetap sangat vital dalam memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi korban. Ini memungkinkan hakim untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang apa yang sebenarnya terjadi pada korban dan bagaimana dampak kekerasan seksual tersebut mempengaruhi kehidupan mereka.

Selain itu, terdapat berbagai kendala dan tantangan dalam penggunaan visum psikiatrikum dalam proses pembuktian. Salah satu kendala utama adalah ketika korban mengalami kesulitan dalam memberikan keterangan yang konsisten atau terperinci tentang peristiwa yang dialaminya, yang sering kali disebabkan oleh trauma atau ketakutan terhadap pelaku. Hal ini mengakibatkan



visum psikiatrikum terkadang tidak mampu memberikan gambaran yang jelas tentang peristiwa kekerasan yang terjadi, meskipun hasilnya bisa menunjukkan adanya dampak psikologis. Dalam hal ini, meskipun visum psikiatrikum berfungsi untuk menggambarkan dampak trauma psikologis yang dialami korban, tetap diperlukan pendekatan yang lebih holistik untuk menangani perkara kekerasan seksual terhadap anak, yang melibatkan berbagai pihak terkait, seperti ahli psikologi, pendamping korban, dan lembaga perlindungan anak, agar korban dapat diberikan perlindungan yang maksimal (Nurjanah, 2020).

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, visum psikiatrikum dapat menjadi bukti yang sangat kuat, namun tetap harus dilihat dalam konteks yang lebih luas. Hal ini berarti bahwa meskipun visum psikiatrikum sangat penting dalam mengungkapkan dampak kekerasan seksual terhadap korban, pembuktian dalam perkara pidana harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip pembuktian yang sah dan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, visum psikiatrikum tidak bisa berdiri sendiri sebagai bukti yang mutlak, melainkan harus dipadukan dengan bukti-bukti lainnya, seperti kesaksian korban dan bukti fisik, untuk membuktikan bahwa peristiwa kejahatan seksual tersebut memang benar terjadi dan dampaknya terhadap korban sangat signifikan. Hal ini penting agar keputusan yang diambil oleh pengadilan dapat mencerminkan keadilan dan perlindungan yang seimbang bagi korban.

Melihat pentingnya visum psikiatrikum dalam pembuktian perkara pidana kekerasan seksual terhadap anak, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai kekuatan visum psikiatrikum sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan bukti visum psikiatrikum dan mengkaji relevansi serta efektivitas penggunaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penggunaan visum psikiatrikum dalam perkara pidana kekerasan seksual terhadap anak, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas visum psikiatrikum sebagai alat bukti yang sah dan dapat diandalkan dalam proses peradilan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan visum psikiatrikum dalam pembuktian perkara pidana kekerasan seksual terhadap anak di sistem peradilan Indonesia?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi validitas dan efektivitas visum psikiatrikum sebagai alat bukti dalam perkara pidana kekerasan seksual terhadap anak?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kekuatan visum psikiatrikum dalam pembuktian perkara pidana kekerasan seksual terhadap anak di pengadilan Indonesia, serta peranannya dalam proses pembuktian yang sah menurut hukum.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi validitas dan efektivitas visum psikiatrikum sebagai alat bukti dalam perkara pidana kekerasan seksual terhadap anak, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan penggunaan visum psikiatrikum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik-praktik hukum yang berlaku dalam sistem peradilan Indonesia. Metode ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara mendalam mengenai penerapan visum psikiatrikum dalam pembuktian perkara pidana kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan ketentuan hukum yang ada, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Penelitian ini juga akan meninjau literatur hukum yang terkait dengan visum psikiatrikum, serta keputusan-keputusan pengadilan yang dapat memberikan gambaran mengenai kekuatan visum psikiatrikum sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), di mana penulis akan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, buku, dan artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga akan membandingkan berbagai pandangan dan teori hukum yang ada, serta melihat praktik pembuktian dalam perkara pidana kekerasan seksual terhadap anak, untuk mengetahui sejauh mana visum psikiatrikum dapat diterima sebagai bukti yang sah di pengadilan. Dengan menggunakan pendekatan normatif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai peran visum psikiatrikum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuatan Visum Psikiatrikum Dalam Pembuktian Perkara Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Sistem Peradilan Indonesia

Visum psikiatrikum merupakan salah satu alat bukti yang digunakan dalam pembuktian perkara pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Sebagai bukti yang mengungkapkan dampak psikologis yang dialami korban, visum psikiatrikum memiliki peran yang sangat penting dalam menggambarkan keadaan mental dan emosional anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam praktiknya, visum psikiatrikum sering kali digunakan oleh jaksa penuntut umum untuk membuktikan adanya trauma psikologis akibat tindakan kekerasan seksual, yang dapat memperkuat argumen bahwa perbuatan tersebut memang terjadi (Fauzi, 2017). Kekuatan visum psikiatrikum dalam pembuktian perkara pidana di Indonesia, meskipun signifikan, sering kali masih tergantung pada bagaimana visum tersebut dipersepsikan oleh hakim, serta bagaimana bukti lainnya dapat mendukung klaim yang diajukan.

Namun, meskipun visum psikiatrikum dapat menjadi alat bukti yang kuat dalam menggambarkan dampak kekerasan seksual, kekuatan visum ini dalam pembuktian perkara pidana tidak selalu absolut. Salah satu alasan utamanya adalah bahwa visum psikiatrikum hanya menggambarkan kondisi psikologis korban setelah peristiwa kekerasan, dan bukan merupakan bukti langsung terjadinya peristiwa kekerasan seksual itu sendiri. Oleh karena itu, visum psikiatrikum biasanya tidak cukup kuat sebagai bukti tunggal dalam perkara pidana kekerasan seksual terhadap anak. Pembuktian yang sah dalam hukum pidana Indonesia mengharuskan adanya bukti lain yang mendukung visum psikiatrikum, seperti kesaksian korban atau bukti fisik, untuk membuktikan bahwa perbuatan kekerasan seksual benar-benar terjadi. Dalam banyak kasus, visum psikiatrikum



hanya berfungsi untuk memperkuat bukti-bukti lain yang ada, sehingga peranannya sangat bergantung pada konteks dan kualitas bukti lainnya (Hadi, 2021).

Selain itu, salah satu faktor yang mempengaruhi kekuatan visum psikiatrikum adalah kualitas dan kredibilitas pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga medis atau ahli psikiatri. Di Indonesia, masih terdapat perbedaan dalam hal kompetensi dan standar pemeriksaan antara tenaga medis yang satu dengan yang lainnya. Hal ini bisa memengaruhi hasil visum psikiatrikum, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kekuatan visum tersebut dalam pembuktian perkara pidana. Oleh karena itu, kualitas pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli psikiatri yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang baik sangat penting agar visum psikiatrikum yang dihasilkan dapat diterima dengan baik di pengadilan. Dalam beberapa kasus, apabila pemeriksaan tidak dilakukan dengan hati-hati atau tidak mengikuti prosedur yang benar, visum psikiatrikum dapat dianggap tidak valid atau kurang dapat diandalkan sebagai alat bukti.

Tantangan lain yang sering dihadapi dalam penggunaan visum psikiatrikum sebagai bukti dalam perkara pidana adalah pemahaman hakim terhadap psikologi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Hakim yang tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai psikologi anak mungkin akan kesulitan dalam menilai sejauh mana dampak psikologis yang diungkapkan dalam visum psikiatrikum mempengaruhi keputusan yang diambil. Dalam hal ini, penting bagi pengadilan untuk memiliki akses terhadap ahli psikologi atau psikiatri yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai dampak psikologis kekerasan seksual terhadap anak. Dengan adanya penjelasan yang jelas dari para ahli, hakim dapat lebih mudah memahami bagaimana visum psikiatrikum berperan dalam membuktikan terjadinya kekerasan seksual, serta memberikan keputusan yang lebih adil bagi korban.

Akhirnya, meskipun visum psikiatrikum memiliki kekuatan sebagai alat bukti dalam perkara pidana kekerasan seksual terhadap anak, penggunaannya harus diimbangi dengan bukti-bukti lain yang relevan dan mendukung. Pembuktian perkara pidana harus didasarkan pada prinsip keadilan dan pemeriksaan yang menyeluruh, yang menggabungkan berbagai macam bukti untuk menghasilkan keputusan yang objektif dan benar. Oleh karena itu, visum psikiatrikum harus dilihat sebagai bagian dari keseluruhan proses pembuktian, dan tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan bukti lain. Ketika digunakan dengan tepat dan didukung oleh bukti yang kuat, visum psikiatrikum dapat memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku (Purnomo, 2018).

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Validitas Dan Efektivitas Visum Psikiatrikum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Visum psikiatrikum, meskipun sangat penting dalam pembuktian perkara pidana kekerasan seksual terhadap anak, memiliki sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi validitas dan efektivitasnya. Salah satu faktor utama yang memengaruhi validitas visum psikiatrikum adalah kualitas pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga medis atau ahli psikiatri. Pemeriksaan yang tidak dilakukan dengan prosedur yang tepat atau oleh tenaga medis yang tidak berkompeten dapat menghasilkan visum yang tidak valid atau tidak dapat dipercaya. Di Indonesia, kualitas tenaga medis yang melakukan pemeriksaan psikiatrikum sangat bervariasi, dan tidak semua ahli psikiatri memiliki pengalaman atau keahlian dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.



Ketidaksesuaian dalam standar prosedur atau kualitas pemeriksaan dapat mengurangi keefektifan visum psikiatrikum sebagai alat bukti yang sah dalam peradilan pidana.

Selain itu, faktor psikologis korban juga dapat memengaruhi hasil visum psikiatrikum. Banyak anak korban kekerasan seksual yang mengalami trauma psikologis yang berat dan mungkin tidak dapat mengingat atau menggambarkan kejadian kekerasan dengan jelas. Hal ini dapat mempersulit pemeriksaan psikiatrikum dan memengaruhi keakuratan hasil visum. Trauma yang dialami oleh korban, seperti perasaan takut atau cemas, dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk memberikan informasi yang tepat tentang apa yang terjadi. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, korban mungkin kesulitan untuk berbicara tentang kejadian kekerasan karena takut terhadap pelaku atau merasa malu untuk mengungkapkan apa yang terjadi. Ketidaktepatan atau ketidaklengkapan informasi yang diberikan oleh korban selama pemeriksaan dapat menurunkan efektivitas visum psikiatrikum sebagai alat bukti (Hidayat et al, 2019).

Faktor lain yang mempengaruhi efektivitas visum psikiatrikum adalah sikap dan pemahaman hakim terhadap visum tersebut. Dalam beberapa kasus, hakim yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang psikologi anak atau trauma psikologis yang dialami oleh korban mungkin akan kurang memahami dan menghargai visum psikiatrikum. Hal ini dapat menyebabkan visum psikiatrikum tidak dipertimbangkan secara maksimal dalam proses pembuktian. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan adanya pelatihan atau penyuluhan bagi hakim mengenai pentingnya visum psikiatrikum dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak. Pemahaman yang lebih baik tentang dampak psikologis kekerasan terhadap anak akan membantu hakim dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan adil.

Selain itu, faktor sosial dan budaya juga berperan dalam menentukan efektivitas visum psikiatrikum. Dalam beberapa masyarakat, terutama di daerah-daerah yang lebih konservatif, ada stigma sosial yang kuat terkait dengan masalah kekerasan seksual. Korban yang berasal dari lingkungan ini mungkin merasa kesulitan untuk melaporkan kejadian kekerasan yang dialami mereka atau bahkan untuk menerima pemeriksaan medis atau psikiatrikum. Hal ini dapat mempengaruhi hasil visum psikiatrikum, karena korban mungkin tidak memberikan informasi yang cukup jelas atau bahkan menutupi kejadian kekerasan yang mereka alami. Stigma sosial ini dapat menghalangi upaya untuk memperoleh visum yang akurat dan dapat diterima di pengadilan (Ramdhan et al, 2020).

Terakhir, faktor regulasi dan prosedural dalam sistem peradilan pidana Indonesia juga mempengaruhi efektivitas visum psikiatrikum. Prosedur hukum yang berlaku di Indonesia mengharuskan adanya prosedur yang ketat dalam pengajuan dan penerimaan visum psikiatrikum sebagai alat bukti. Beberapa prosedur yang belum sepenuhnya standar atau terkoordinasi antar lembaga penegak hukum dapat menghambat penggunaan visum psikiatrikum secara efektif. Ketidakjelasan dalam prosedur atau standar yang diterapkan dalam pemeriksaan psikiatrikum dapat menyebabkan visum tidak diterima atau dianggap kurang efektif di pengadilan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk menyusun pedoman yang lebih jelas dan terstandarisasi mengenai penggunaan visum psikiatrikum dalam perkara pidana, agar dapat meningkatkan efektivitas dan validitasnya sebagai alat bukti dalam proses peradilan (Santoso, 2017).



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa visum psikiatrikum memiliki kekuatan yang signifikan dalam pembuktian perkara pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, terutama dalam menggambarkan dampak psikologis yang dialami korban. Meskipun visum psikiatrikum berperan penting dalam memberikan bukti tambahan mengenai kondisi mental dan emosional korban, visum ini tidak dapat berdiri sendiri sebagai bukti yang mutlak. Untuk memperkuat kekuatan visum psikiatrikum dalam pembuktian, diperlukan dukungan dari bukti lain seperti kesaksian korban, bukti fisik, dan bukti lainnya yang relevan. Selain itu, faktor-faktor seperti kualitas pemeriksaan, pemahaman hakim, dan kondisi sosial budaya juga mempengaruhi validitas dan efektivitas visum psikiatrikum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan standar prosedural dalam pemeriksaan psikiatrikum, serta memberikan pelatihan bagi hakim mengenai pentingnya visum psikiatrikum dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini diharapkan dapat memperkuat posisi visum psikiatrikum sebagai alat bukti yang sah dan efektif dalam proses peradilan pidana, sehingga dapat memberikan keadilan yang lebih baik bagi korban kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fauzi, "Visum Psikiatrikum dalam Pembuktian Perkara Pidana Kekerasan Seksual Anak di Indonesia," *Jurnal Forensik dan Psikiatri* 9, no. 4 (2017): 56-70.
- Dwi Purnomo, "Peran Ahli Psikiatri dalam Kasus Kekerasan Seksual Anak: Kajian atas Pembuktian di Pengadilan," *Jurnal Psikologi Forensik* 6, no. 1 (2018): 58-72.
- Heru Santosa, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Validitas Visum Psikiatrikum dalam Kasus Kekerasan Seksual Anak," *Jurnal Hukum Pidana* 16, no. 1 (2017): 123-135.
- M. S. Hadi, "Penerimaan Visum Psikiatrikum sebagai Bukti dalam Proses Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 22, no. 3 (2021): 205-220.
- Maulana N. Ramadhan dan Rizki Prasetya, "Kekuatan Hukum Visum Psikiatrikum dalam Pembuktian Kasus Kekerasan Seksual Anak," *Jurnal Keamanan dan Hukum* 30, no. 1 (2020): 75-89.
- Rudianto A. Siregar dan Dwi Hartanto, "Tantangan dalam Penggunaan Visum Psikiatrikum sebagai Alat Bukti dalam Kasus Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Ilmu Hukum* 25, no. 1 (2019): 92-104.
- Siti Nurjanah, "Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Tantangan Pembuktian dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Peradilan dan Hukum* 14, no. 2 (2020): 168-183.
- Sri Wahyuni, "Peran Visum Psikiatrikum dalam Pembuktian Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, no. 3 (2018): 274-286.
- Taufik Hidayat dan Irma Suryani, "Analisis Pengaruh Visum Psikiatrikum dalam Pembuktian Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Pengadilan Indonesia," *Jurnal Keilmuan Hukum Indonesia* 29, no. 2 (2019): 134-149.